Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma
Vol. 6, No. 1, 104-117
P-ISSN: 1412-9426 E-ISSN: 2745-4185

Dari Individu ke Sistem: Peran Psikologi Kritis dalam Memahami dan Mengatasi Krisis Lingkungan

Raden Rara Maria Anita Dewi Sari[1]
Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
https://doi.org/10.24071/suksma.v6i1.10824

Naskah Masuk 15 Desember 2024 Naskah Diterima 2 Mei 2025 Naskah Dipublikasikan 31 Mei 2025

Abstract. The current environmental crisis demands fundamental changes in our ways of thinking and behavior. Critical psychology offers a unique lens for understanding how social, cultural, and economic systems shape environmentally damaging behavior. By uncovering the structural roots of the problem, such as social constructions of nature and unequal power relations, critical psychology promotes transformation towards a more sustainable society. This research highlights the importance of integrating local wisdom in efforts to address the environmental crisis, while critically analyzing the threats faced by traditional practices. In doing so, critical psychology paves the way for collaboration between scientific and local knowledge to create more inclusive and effective solutions.

Keywords: Critical Psychology, Environment, Local Wisdom, Social Transformation

Pendahuluan

Krisis lingkungan yang semakin mendesak, seperti perubahan iklim dan kerusakan ekosistem, menuntut perubahan mendasar dalam perilaku manusia. Konsumsi energi yang berlebihan, penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan, danpola produksi yang tidak berkelanjutan adalah beberapa contoh perilaku yang berkontribusi pada masalah ini. Psikologi, sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia memiliki peran krusial dalam memahami faktor-faktor yang mendorong atau menghambat perilaku pro-lingkungan.

Namun, pendekatan tradisional dalam psikologi lingkungan kerap terjebak dalam analisis individualistik, yaitu berfokus pada perilaku individu tanpa mempertimbangkan pengaruh faktor sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Seperti yang ditekankan oleh Foucault (dalam Alberts 2013),

Korespondensi Penulis
(Raden Rara Maria Anita Dewi Sari, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta)
Email: radenrara.mariaanita@gmail.com

pengetahuan dan kekuasaan saling terkait, dan sistem sosial yang ada seringmemperkuat perilaku yang merusak lingkungan. Di sinilah psikologi kritis hadir sebagai sebuah paradigma yang menawarkan perspektif yang lebih mendalam dan transformatif. Dengan menganalisis bagaimana sistem sosial, budaya, dan ekonomi membentuk nilai-nilai dan perilaku kita, psikologi kritis dapat membantu kita merancang intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi akar penyebab masalah lingkungan.

Psikologi kritis, dengan akarnya dalam teori-teori kritis seperti Marxisme, feminisme, dan postkolonialisme, mengundang kita untuk melihat perilaku manusia sebagai hasil dari struktur sosial yang tidak setara. Dalam konteks lingkungan, psikologi kritis mengungkap bagaimana sistem kapitalisme dengan fokus utamanya pada keuntungan pribadi dan pertumbuhan ekonomi tanpa batas, telah membentuk hubungan manusia dengan lingkungan secara signifikan. Dalam mengejar profit, kebijakan lingkungan seringkali dikesampingkan demi keuntungan jangka pendek. Perusahaan besar, dengan pengaruhnya yang kuat, seringkali melobi pemerintah untuk mengurangi regulasi lingkungan demi kepentingan bisnis mereka. Dalam penelitian Lumbanturoan dan Marbun (2025), percepatan industrialisasi di negara-negara berkembang kerap berlangsung dengan mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan seperti produksi massal dan tingkat konsumsi yang tinggi semakin memperburuk dampak perubahan iklim yang telah dirasakan secara global. Selain itu, fenomena deindustrialisasi di negara-negara maju, yang ditandai dengan relokasi pabrik oleh perusahaan besar ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, berkontribusi terhadap peningkatan pencemaran lingkungan, terutama di wilayah dengan regulasi lingkungan yang lemah (Lumbanturoan & Marbun, 2025).

Sistem ini juga mendorong pola konsumsi yang berlebihan, di mana barang-barang cepat dibuang dan digantikan dengan yang baru, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi dan pembuangan. Iklan juga berperan besar dalam menciptakan kebutuhan semu dan mendorong konsumsi berlebihan (Gilbert, 2008). Dampak lingkungan dari kapitalisme seringkali tidak merata, dengan kelompok masyarakat miskin dan marginal yang paling terdampak karena kelompok ini tinggal di daerah yang rentan mengalami penggusuran, polusi atau bencana ekologis. Dalam situasi konflik semacam ini, kelompok miskin cenderung mengalami kekalahan karena kelompok kaya memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber daya ekonomi (Amri, 2017).

Konstruksi sosial tentang alam dalam sistem kapitalisme telah membentuk pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai penguasa alam (Yuono, 2019). Akar historis pandangan ini dapat ditelusuri hingga revolusi industri, di mana alam dipandang semata-mata sebagai sumber daya yang tak terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam sistem kapitalisme, alam seringkali dipandang sebagai objek yang dapat dimiliki dan diperdagangkan. Relasi kuasa yang tidak setara juga memperkuat eksploitasi alam, di mana kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dapat menentukan bagaimana sumber daya alam digunakan. Akibatnya, eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan menjadi marak.

©2025 Sari

Banyak ahli telah menyoroti pentingnya perspektif psikologi kritis dalam memahami krisis lingkungan. Stern (2000) menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dan kultural dalam memahami perilaku pro-lingkungan. Psikologi kritis memandang bahwa kegagalan individu untuk bertindak pro-lingkungan bukanlah semata-mata akibat kurangnya kesadaran atau motivasi pribadi, melainkan hasil dari pengaruh faktor sosial, budaya, politik, dan struktural yang membentuk perilaku mereka. Sistem sosial dan ekonomi yang dominan, seperti kapitalisme, sering kali menciptakan kondisi yang memprioritaskan konsumsi berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga membuat perilaku pro-lingkungan menjadi sulit diakses atau bahkan tidak relevan bagi banyak orang. Kepemilikan barang-barang material kerap dipersepsikan sebagai indikator kebahagiaan yang melebihi sekadar pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Veblen dalam Tampubolon & Purba, 2021).

Selain itu, norma sosial dan identitas kelompok juga memainkan peran besar, di mana individu cenderung tidak mengambil perilaku pro-lingkungan jika komunitas mereka tidak mendukung atau menganggapnya penting. Psikologi kritis menyoroti bahwa sering kali tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dibebankan pada individu, sementara pelaku utama kerusakan, seperti perusahaan besar, tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Hal ini menimbulkan rasa apatis atau ketidakberdayaan di kalangan individu. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam akar-akar struktural ini, dengan harapan dapat digunakan untuk merancang intervensi yang lebih efektif guna mendorong perubahan perilaku menuju keberlanjutan.

Pembahasan

Psikologi kritis menawarkan sebuah lensa yang berbeda untuk melihat hubungan manusia dengan lingkungan. Alih-alih hanya fokus pada perilaku individu, psikologi kritis mengajak kita untuk menggali akar-akar struktural yang membentuk cara kita berpikir dan bertindak terhadap lingkungan.

Sistem Kapitalisme Neoliberal: Mesin Konsumsi yang Tak Terkendali

Sebelum dominasi ekonomi pasar, interaksi ekonomi masyarakat lebih didasarkan pada prinsip timbal balik, seperti pertukaran hadiah atau sistem redistribusi kekayaan. Norma sosial dan budaya sangat berperan dalam mengatur perilaku ekonomi. Namun, munculnya sistem pasar modern menandai pergeseran paradigma yang signifikan. Sistem pasar modern dalam konteks kapitalisme menciptakan persaingan pasar bebas yang tidak terbatas, yang memengaruhi daya kerja dan sistem ekonomi, serta memberikan individu hak tak terbatas untuk mengakumulasi kekayaan (Anggraeni dkk, 2024). Individu didorong untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, sering kali mengabaikan nilai-nilai sosial dan lingkungan yang sebelumnya lebih dihargai dalam masyarakat. Konsumsi barang dan jasa menjadi pusat ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan laba tanpa memperhitungkan dampak sosial atau ekologis. Dalam penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Dua, kapitalisme cenderung mengabaikan

©2025 Sari

nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat lokal, seperti semangat gotong-royong, loyalitas terhadap keluarga, dan penghormatan terhadap pengalaman manusia sebagai sesuatu yang sakral (Dua, 2013). Norma sosial yang lebih tradisional sering kali dilihat sebagai hambatan dalam mencapai tujuan kapitalistik, yang lebih menekankan pada individualisme, pencapaian pribadi, dan konsumsi tanpa batas. Aktivitas ekonomi dilepaskan dari kendali sosial dan politik, membebaskan individu untuk mengejar keuntungan pribadi tanpa batas. Transformasi ini, yang digambarkan oleh Karl Polanyi, menandai peralihan dari sistem ekonomi pra-kapitalis menuju kapitalisme yang beragam bentuknya, seperti neoliberalisme atau sosial-demokrasi (Adler, 2015).

Menurut Tampubolon dan Purba (2021), sistem kapitalisme neoliberal yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas dan keuntungan pribadi, menjadi salah satu pendorong utama krisis lingkungan. Hal ini menguatkan penelitian sebelumnya dari Foster (2012) yang menyatakan dorongan untuk terus meningkatkan konsumsi tanpa batas menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Akibatnya, kerusakanlingkungan semakin meluas, sementara ketidakseimbangan ekosistem makin parah.

Dalam sistem ini, banyak perusahaan mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan (Janicka dkk, 2020). Sektor-sektor seperti pertambangan adalah contoh nyata, di mana eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara intensif tanpa memikirkan dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat lokal. Industri perminyakan telah memberikan keuntungan finansial yang sangat besar, tetapi juga menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan yang serius, termasuk tumpahan minyak dan kontribusinya terhadap perubahan iklim. Sementara itu, ekspansi perkebunan sawit di negara-negara berkembang sering kali memicu deforestasi yang masif, mengurangi keanekaragaman hayati, dan menciptakan konflik sosial di daerah terdampak. Sikap ini menunjukkan betapa perusahaan seringkali lebih berfokus pada keuntungan instan daripada menjaga keseimbangan lingkungan yang diperlukan untuk jangka panjang (Kushendrawati, 2006; Janicka dkk, 2020).

Kecenderungan konsumsi yang tidak terkendali ini semakin diperparah oleh budayakonsumerisme yang terus didorong oleh iklan dan promosi massal (Gilbert, 2008) Masyarakat didorong untuk membeli barang-barang yang sering kali tidak mereka butuhkan, yang pada gilirannya memicu produksi berlebihan dan peningkatan limbah. Hal ini mempercepat siklus konsumsi yang semakin menguras sumber daya alam dan menghasilkan limbah yang sulit diatasi.

Industri energi fosil menghasilkan eksternalitas negatif yang signifikan, mencerminkan kegagalan pasar yang serius. Ketika perusahaan energi fosil membakar bahan bakar fosil, mereka melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer tanpa menanggung sepenuhnya biaya lingkungan yang ditimbulkan. Akibatnya, beban kerusakan lingkungan justru dipikul oleh masyarakat luas, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan komunitas adat. Masyarakat miskin sering tinggal di daerah yang paling terdampak perubahan iklim, seperti wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut atau daerah pertanian yang menghadapi risiko kekeringan. Keterbatasan akses terhadap sumber daya dan teknologi adaptasi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi mereka. Hal ini mencerminkan

©2025 Sari

kelemahan sistem ekonomi dalam menginternalisasi dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia (Janicka, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Dilasari dkk. (2022) menguatkan bahwa kegagalan utama pasar dalam industri bahan bakar fosil berasal dari eksternalitas negatif yang dihasilkannya, seperti perubahan iklim dan polusi udara.

Relasi Kuasa: Siapa yang Menentukan Nasib Lingkungan?

Ketidaksetaraan dalam relasi kuasa antara kelompok-kelompok sosial yang berbedaberdampak besar pada kondisi lingkungan (Bullard, 2000). Kelompok-kelompok yang lebih lemah atau terpinggirkan sering kali harus menanggung beban kerusakan lingkungan yang tidak mereka sebabkan. Ketidakseimbangan ini menciptakan situasi di mana mereka yang memiliki kekuatan lebih besar mengambil keputusan yangmerugikan kelompok yang kurang atau bahkan tidak berkuasa. Masyarakat adat di Indonesia, seperti Suku Togutil dan Amungme, seringkali menjadi korban ketidakadilan struktural. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan telah merampas hak-hak mereka atas tanah, sumber air, dan hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Praktik-praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab, didukung oleh kebijakan pemerintah yang lemah, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Suku Togutil di Halmahera adalah contoh nyata bagaimana proyek-proyek besar, seperti pertambangan, dapat menghancurkan kehidupan masyarakat adat (Edom dkk, 2019). Pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, dan penggusuran telah memaksa suku Togutil meninggalkan tanah leluhur mereka. Ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat telah memperparah situasi ini. Nasib serupa menimpa Suku Amungme di Papua. Aktivitas pertambangan skala besar telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas dan konflik sosial. Masyarakat Amungme kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka. Lemahnya penegakan hukum dan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perusahaan tambang dan masyarakat adat telah menghambat upaya mereka untuk mendapatkan keadilan.

Warisan kolonial yang mengutamakan eksploitasi sumber daya alam masih berdampak hingga kini dengan ditandai oleh ketimpangan kepemilikan tanah dan melemahnya sistem hukum adat yang menghambat masyarakat adat dalam mengklaim hak-hak mereka. (Hutajulu dkk, 2024). Proyek pertambangan besar-besaran yang beroperasi di wilayah mereka telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang selama berabad-abad hidup selaras dengan alam. Kebijakan pemerintah yang cenderung memihak korporasi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan telah memperparah situasi. Akibatnya, suku Togutil dan Amungme kehilangan tanah, mata pencaharian, dan martabat mereka. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok elit tertentu, yaitu perusahaan tambang multinasional dan pemerintah yang merumuskan regulasi Penanaman Modal Asing (Mustofa dkk, 2022). Setiap keuntungan yang dinikmati oleh kaum elit di sisi lain menyebabkan masyarakat adat yang menanggung beban kerusakan lingkungan dan sosial. Suku

©2025 Sari

Togutil dan Amungme ini berada pada oposisi biner dalam relasi kekuasaan atau tersubordinat karena posisi mereka sebagai subaltern.

Subaltern ini merupakan konsep yang digunakan oleh Gramsci (2013) untuk menjelaskan tentang masyarakat yang terhegemoni atau masyarakat yang terpinggirkan dalam relasi kekuasaan. Mereka yang berada posisi subaltern tidak saja terpinggirkan secara politik, akan tetapi juga termarginalisasi secara sosial, budaya, dan kepercayaan. Hegemoni pengetahuan kolonial telah menciptakan gap yang dalam antara kelompok dominan dan subaltern, sehingga menyulitkan kelompok yang terpinggirkan untuk menyuarakan aspirasi mereka (Spivak, 1988). Sebagai kelompok subaltern, suara Suku Togutil dan Amungme tidak diakui dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, dan narasi mereka sering terpinggirkan oleh wacana pembangunan serta investasi. Selain itu, militer diberikan kekuasaan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat Suku Amungme yang melakukan protes karena terusir dari tanah ulayat mereka (Amiruddin & Soares, 2003). Dengan demikian, peminggiran Suku Togutil dan Suku Amungme dari tanah ulayat mereka bukan hanya persoalan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga mencerminkan ketimpangan dalam relasi kuasa yang terus berlanjut. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti reformasi kebijakan, penegakan hukum yang tegas, dan mekanisme keadilan transisi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat. Penting untuk membangun model pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang menempatkan hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama.

Konstruksi Sosial Alam dalam Lensa Psikologi Kritis

Psikologi kritis menawarkan sudut pandang yang mendalam tentang bagaimana realitas sosial dibentuk oleh masyarakat, termasuk cara kita memahami alam. Pemahaman kita tentang lingkungan bukanlah sesuatu yang netral atau objektif, melainkan merupakan hasil dari proses konstruksi sosial. Persepsi kita terhadap alam, cara kita bertindak terhadapnya, serta pemahaman kita tentang dampak perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dominan, struktur politik, dan praktik ekonomi (Solomonian & Di Ruggiero 2021). Salah satu konstruksi sosial paling signifikan adalah pandangan yang memperlakukan alam semata-mata sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pandangan ini telah mendominasi selama berabad-abad, membawa konsekuensi luas bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan antroposentrisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta dan segala sesuatu berputar di sekitarnya, telah memicu eksploitasi lingkungan secara besar-besaran. Akar historis dari antroposentrisme dapat ditelusuri kembali ke revolusi industri, di mana pandangan bahwa alam semesta ada untuk dimanfaatkan demi kemajuan manusia semakin menguat. Pandangan ini diperkuat oleh filsafat Barat yang memisahkan antara manusia dan alam, serta doktrin agama tertentu yang menempatkan manusia sebagai penguasa alam. Kolonialisme juga berperan penting dalam memperkuat antroposentrisme, dengan eksploitasi sumber daya alam di koloni-koloni tanpa mempertimbangkan

©2025 Sari

dampak lingkungan dan sosial. Kapitalisme modern, dengan penekanannya pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas, semakin memperkuat pandangan antroposentris ini. Naess (dalam Ohoiwutun, 2020) berpendapat bahwa antroposentrisme telah mengarah pada pemisahan diri manusia dari alam, sehingga manusia merasa berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Pandangan ini telah menjadi landasan bagi banyak kebijakan pembangunan yang merugikan lingkungan, seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim.

Psikologi kritis menggarisbawahi bahwa konstruksi sosial ini bukanlah netral, melainkan hasil dari relasi kuasa yang tidak setara. Michel Foucault, dalam karya- karyanya pada tahun 1960-an dan 1970-an, berargumen bahwa pengetahuan dankekuasaan saling terkait. Kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi danpolitik yang lebih besar seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang alam (Focault dalam Alberts 2013). Mereka yang memiliki akses ke sumber daya alam cenderung melihat alam sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Pandangan ini diperkuat oleh ideologi dominan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa batas dan mengabaikan dampak lingkungan.

Lebih jauh, psikologi kritis mengungkap bagaimana konstruksi sosial ini memicu alienasi manusia dari alam. Erich Fromm (1955) berpendapat bahwa alienasi dari alam adalah salah satu akar penyebab masalah sosial dan psikologis. Dengan memandang alam sebagai objek yang terpisah dan dapat dikuasai, manusia kehilangan hubungan emosional dan spiritual dengan alam. Akibatnya, manusia cenderung kurang peduli terhadap kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Konstruksi sosial ini juga menguatkan sistem sosial yang tidak berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi seringkali diprioritaskan di atas kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, psikologi kritis mendorong kita untuk melakukan dekonstruksi terhadap pandangan yang ada (Adams, 2021). Kita perlu mengkritisi asumsi-asumsi yang mendasari eksploitasi alam dan membangun pemahaman yang lebih holistik tentang hubungan manusia dengan alam. Selain itu, psikologi kritis juga menekankan pentingnya transformasi sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana manusia hidup selaras dengan alam.

Penelitian terkini, menunjukkan bagaimana konstruksi sosial tentang alam dan manusia telah membentuk perilaku konsumtif dan merusak lingkungan (Steffen dkk, 2007; Ellis dkk, 2010). Misalnya pada penelitian Steffen dkk (2011), yang menunjukkan bagaimana narasi dominan tentang alam sebagai sumber daya yang tak terbatas telah berkontribusi pada krisis iklim. Untuk mengatasi masalah ini, para psikolog kritis mengusulkan pendekatan yang lebih holistik, yang mengintegrasikan pemahaman psikologis, sosial, dan ekologis. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nisbet dkk (2009) mengusulkan model psikologis yang menekankan pentingnya koneksi emosional dengan alam sebagai dasar untuk tindakan lingkungan. Dengan demikian,psikologi kritis menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia alam.

©2025 Sari

Psikologi Kritis sebagai Landasan untuk Memahami Perilaku Pro-Lingkungan

Psikologi kritis menekankan pentingnya identitas sosial dalam membentuk pandangan dan perilaku seseorang terhadap isu-isu lingkungan (Rathzel & Uzzell, 2019). Identitas ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik yang secara kolektif membentuk cara pandang individu terhadap alam dan kelestariannya. Seseorang yang merasa menjadi bagian dari komunitas atau kelompok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan akan lebih cenderung bersikap proaktif dalam menjaga dan melestarikan alam. Identitas kelompok ini tidak hanya memberikan rasa memiliki terhadap tujuan-tujuan lingkungan, tetapi juga mendorong tindakan nyata, seperti mendaur ulang, mengurangi jejak karbon, atau terlibat dalam advokasi kebijakan pro-lingkungan. Faktor sosial ini menjadi motivasi yang kuat dalam memengaruhi perilaku seseorang secara positif, terutama ketika komunitas di sekitarnya memiliki norma-norma yang mendukung keberlanjutan.

Lebih jauh lagi, psikologi kritis mengaitkan konsep keadilan lingkungan dengan ketidakadilan sosial yang sering kali saling terkait (Rathzel & Uzzell, 2019). Ketika ketidakadilan sosial terjadi, dampak lingkungannya tidak dapat dihindari. Misalnya, masyarakat miskin atau minoritas sering kali menjadi korban kerusakan lingkungan akibat industrialisasi atau eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, meskipun mereka bukan pihak yang paling banyak berkontribusi terhadap perusakan lingkungan tersebut. Psikologi kritis menyoroti bahwa ketidakadilan lingkungan ini tidak hanya terjadi pada level sosial, tetapi juga melibatkan lapisan politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, setelah membahas dampak ketidakadilan pada kelompok miskin, penting untuk memperluas pandangan kita dengan melihat struktur yang lebih besar, yang melibatkan kebijakan politik merugikan, praktik ekonomi eksploitatif, dan sistem hukum yang seringkali mengabaikan hak-hak lingkungan masyarakat marginal. Sistem-sistem ini berinteraksi dalam mempertahankan ketimpangan, memperburuk ketidakadilan yang dialami oleh kelompok yang paling rentan (Foster dkk, 2012).

Pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara ketidakadilan sosial dan lingkungan dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi-aksi pro-lingkungan yang juga berupaya mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan individu dan komunitas menjadi elemen kunci dalam psikologi kritis untuk mendorong perubahan yang signifikan (Dreier, 2020). Pemberdayaan ini mencakup penyediaan informasi, sumber daya, serta keterampilan yang dibutuhkan agar masyarakat merasa lebih mampu dalam menghadapi isu-isu lingkungan yang kompleks. Pendidikan lingkungan yang menyeluruh, misalnya, memberikan individu pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tindakan mereka memengaruhi ekosistem global. Selain itu, komunitas yang memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang pengelolaan sumber daya alam perlu didukung agar peran mereka diakui dalam solusi berkelanjutan. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memperkuat kemampuan individu untuk bertindak secara independen maupun kolektif dalam menjaga lingkungan.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara identitas sosial, keadilan lingkungan, dan pemberdayaan menegaskan pentingnya sinergi ketiga elemen ini dalam membentuk perilaku pro-lingkungan yang

©2025 Sari

lebih luas. Ketika individu menyadari bahwa tindakan mereka berkontribusi terhadap keadilan sosial dan lingkungan, mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam gerakan perubahan yang lebih besar. Penelitian Mulati dan Kuswati (2022) mengungkapkan bahwa sikap peduli lingkungan memiliki hubungan kuat dengan perilaku pro-lingkungan: semakin tinggi tingkat kepedulian seseorang terhadap lingkungan, semakin besar pula kecenderungannya untuk bertindak secara pro-lingkungan. Temuan ini semakin menegaskan bahwa kesadaran individu terhadap lingkungan, yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan nilai keadilan, memainkan peran penting dalam mendorong tindakan nyata untuk keberlanjutan.

Dengan demikian, penguatan kesadaran kolektif dan peningkatan partisipasi aktif dalam komunitas menjadi langkah penting dalam menciptakan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan. Kesadaran individu dan kolektif saling memperkuat dalam mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Melalui kesadaran kolektif, diharapkan lebih banyak orang akan terlibat dalam inisiatif-inisiatif yang mendukung lingkungan, baik melalui perubahan gaya hidup sehari-hari maupun dengan turut serta dalam gerakan sosial dan advokasi kebijakan yang lebih besar (Dreier, 2020). Aksi individu, seperti mengurangi konsumsi plastik, menghemat energi, dan mendukung bisnis yang berkelanjutan, mungkin tampak kecil, namun jika dilakukan secara massal, dapat menciptakan tekanan sosial yang signifikan terhadap perusahaan dan pemerintah. Selain itu, ketika kesadaran kolektif berkembang, ini menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku individu, dengan norma sosial, kebijakan, dan insentif yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Tindakan individu yang dimulai dari kesadaran pribadi dapat memperkuat kesadaran kolektif, yang akhirnya menghasilkan dampak sosial yang lebih luas. Komunitas juga memainkan peran penting dalam mendorong perubahan struktural melalui aksi kolektif, seperti demonstrasi, petisi, dan kampanye kesadaran. Dengan bersatu, komunitas dapat menyuarakan kepentingan mereka dengan lebih kuat dan mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih mendukung keberlanjutan lingkungan. Sebagai hasilnya, terbentuklah kesatuan antara tujuan sosial dan lingkungan yang berfokus pada penciptaan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Psikologi Kritis dan Kearifan Lokal

Kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat, seringkali mengandung pengetahuan mendalam tentang ekosistem dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Afdhal, 2023). Kearifan lokal telah berkembang selama berabad-abad, diadaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan di setiap daerah. Karena keterikatannya yang mendalam dengan situasi spesifik wilayah, pengetahuan ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang unik di setiap tempat. Namun, keberlanjutan praktik kearifan lokal semakin terancam oleh perubahan sosial dan lingkungan yang pesat. Urbanisasi, alih fungsi lahan, dan industrialisasi seringkali menggeser praktik-praktik tradisional dan merusak ekosistem yang menjadi dasar dari kearifan lokal. Modernisasi pertanian, misalnya, seringkali menggantikan sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan dengan

©2025 Sari

metode intensif yang mengandalkan input kimia. Perubahan iklim juga memperburuk situasi, menyebabkan pola cuaca yang tidak menentu dan bencana alam yang lebih sering terjadi, sehingga pengetahuan lokal yang telah diadaptasi untuk kondisi lingkungan tertentu menjadi kurang relevan. Psikologi kritis menawarkan lensa yang unik untuk memahami bagaimana pengetahuan dan praktik lokal dapat berkontribusi pada solusi lingkungan yang berkelanjutan. Dengan menganalisis bagaimana perubahan sosial dan lingkungan mempengaruhi nilai-nilai, keyakinan, dan praktik masyarakat adat, psikologi kritis dapat membantu kita merancang intervensi yang lebih efektif untuk melestarikan kearifan lokal dan mendukung transisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Shiva (2008) menekankan bahwa kearifan lokal menawarkan cara yang berbeda untuk mengetahui dan berada di dunia, yang berakar pada rasa hormat yang mendalamterhadap alam dan keterhubungan. Psikologi kritis mendukung pandangan ini dengan mengkritik dominasi pengetahuan Barat dalam ilmu lingkungan. Dengan mendekolonisasi pengetahuan, kita dapat menghargai keragaman cara manusia memahami dan berinteraksi dengan alam. Kearifan lokal, yang seringkali diabaikan atau direndahkan, sebenarnya menawarkan solusi yang relevan dan berkelanjutan untuk tantangan lingkungan saat ini.

Masyarakat adat memiliki ikatan kuat dengan alam, melihat diri mereka sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar Shiva (2008). Dengan pandangan ini, mereka merasa berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan bijaksana. Hubungan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kearifan lokal sering kali berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan sosialdan kesetaraan. Dalam banyak kasus, pengelolaan sumber daya dilakukan secara kolektif, dengan pengambilan keputusan yang melibatkan komunitas secara menyeluruh. Praktik ini memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan, yang menjadi dasar dari kehidupan bersama yang harmonis.

Contoh kearifan lokal terlihat dalam sistem pertanian terasering yang dirancang untuk mencegah erosi tanah serta menjaga kesuburan lahan. Selain itu, sistem irigasi tradisional juga menunjukkan cara bijak dalam mengelola sumber daya air, memaksimalkan penggunaannya sambil tetap menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Pengelolaan hutan secara lestari merupakan contoh lain dari kearifan lokal yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati. Dengan cara ini, masyarakat adat memastikan ketersediaan sumber daya hutan dalam jangka panjang, sekaligus melestarikan ekosistem hutan untuk generasi mendatang. Untuk memperkuat dan melestarikan kearifan lokal ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, LSM, dan akademisi dengan masyarakat adat. Sebagai contoh, di Kalurahan Sidomulyo Bantul, pemerintah bekerja sama dengan Universitas Sanata Dharma untuk mengembangkan program pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi semacam ini tidak hanya memperkuat kearifan lokal, tetapi juga berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati di tingkat global.

©2025 Sari

Psikologi Kritis dan Pengembangan Solusi Berbasis Komunitas

Psikologi kritis memberikan pandangan yang lebih mendalam terhadap masyarakat dengan menempatkan mereka sebagai agen perubahan yang aktif, bukan hanya penerima dari kebijakan atau intervensi (Dreier, 2020). Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, hal ini berarti masyarakat dapat memainkan peran penting dalam merancang dan menerapkan solusi yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Psikologi kritis tidak hanya mengkritisi struktur kekuasaan yang memengaruhi perilakulingkungan, tetapi juga mendorong partisipasi langsung masyarakat dalam menemukansolusi yang dapat diterapkan di komunitas mereka sendiri (Prilleltensky, 2008). Pendekatan ini menekankan bahwa perubahan yang bertahan lama lebih efektif ketika masyarakat diberdayakan untuk mengambil bagian aktif dalam upaya tersebut. Contoh nyata terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Mailisa, dkk (2020), untuk mengevaluasi karakteristik serta bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Sungai Sani. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga, baik dalam aspek material maupun non-material, memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan dan fungsi ekosistem sungai. Contoh lainnya adalah pengelolaan sampah di Desa Taro, Bali, di mana pemerintah desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan sampah berbasis sumber. Melalui partisipasi aktif, masyarakat berhasil menjaga kebersihan lingkungan dan menjadikan desa ini sebagai model percontohan dalam pengelolaan sampah di Bali (Kalpikawati & Pinaria, 2023).

Salah satu langkah utama adalah melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan mendalam mengenai ekosistem di sekitar mereka, yang diperoleh dari pengalaman hidup dan kearifan lokal. Dengan melibatkan mereka dalampengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan relevan, karena didasarkan pada realitas lokal yang sudah dipahami oleh mereka. Ini juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek-proyek lingkungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keberlanjutan jangka panjang.

Di samping itu, memperkuat kapasitas lembaga-lembaga lokal yang memilikipengalaman dalam pengelolaan sumber daya alam juga penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Lembaga seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang beranggotakan 2.449 komunitas Masyarakat Adat di seluruh Indonesia memiliki praktik yang telah terbukti efektif dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan, namun seringkali tidak mendapatkan dukungan atau pengakuan yang cukup dari pemerintah atau lembaga internasional. Psikologi kritis berperan dalam mendorong pengakuan dan dukungan bagi lembaga-lembaga ini, karena mereka memiliki pengetahuan penting yang dapat digunakan untuk memperbaiki praktik pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya, penting untuk memfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pembuat kebijakan, dan komunitas adat. Proses dialog ini tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga sebagai proses pembelajaran timbal balik. Dengan saling bertukar pengalaman dan pengetahuan, solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan dapat disesuaikan dengan tantangan lingkungan yang berbeda-beda. Kolaborasi antar

©2025 Sari

pihak ini memungkinkan adanya sinergi antara ilmu pengetahuan modern dan kearifan lokal, menciptakan solusi yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam mengatasi krisis lingkungan yang komplek.

Kesimpulan

Perjalanan menuju keberlanjutan lingkungan adalah sebuah transformasi sosialyang mendalam. Dengan mengadopsi lensa kritis, kita telah mengungkap faktor-faktor sistemik yang menjadi dasar perilaku yang tidak berkelanjutan dan degradasi lingkungan. Dari pengejaran pertumbuhan ekonomi yang tanpa henti hingga distribusi beban lingkungan yang tidak merata, jelas bahwa tindakan individu saja tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah kompleks ini. Sebaliknya, kita harus terlibat dalam perubahan sistemik berupa kebijakan ekonomi, sosial dan politik yang menantang narasi dan struktur kekuasaan yang dominan. Dengan memfasilitasi dialog antara akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat, kita dapat menciptakan solusi bersama yang adil dan berkelanjutan secara ekologis. Pada akhirnya, pendekatan yang benar-benar transformatif terhadap tantangan lingkungan membutuhkan pergeseran paradigma yang menghargai keadilan sosial, pengelolaan lingkungan, dan keterkaitan semua makhluk hidup.

Daftar Acuan

Adams, M. (2021). Critical psychologies and climate change. *Current Opinion in Psychology*, *42*, 13–18. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.01.007

Adler, P. S. (2015). *Book review essay: The environmental crisis and its capitalist roots: Reading Naomi Klein with Karl Polanyi.* New York: Simon & Schuster. doi:10.1177/0001839215579183

Afdhal. (2023). Peran perempuan dalam perekonomian lokal melalui ekowisata di Maluku: Tinjauan sosio-ekologi dan sosio-ekonomi. *Resiprokal*, *5*(2).

Alberts, P. (2013). Foucault, nature, and the environment. *A Companion to Foucault,* 544–561.

Amiruddin., & Soares, A. J. (2003). *Perjuangan amungme, antara freeport dan militer.* Jakarta: ELSAM.

Amri, H. (2017). Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menurut Muhammad Sharif Chaudry dalam karyanya fundamental of islamic economic system. *Economica Sharia*, *2*(2).

Anggraeni, E. A., Indiati, P. S. T., Kurniawan, E. R., & Oktafia, R. (2024). Tinjauan perbedaan sistem ekonomi: Ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. *Economic and Business Management International Journal*, *6*(2), doi: 10.556442

Bullard, R. D. (2000). *Dumping in dixie: Race, class, and environmental quality (3rd ed.).* Westview Press.

©2025 Sari

Dilasari, A.P., Ani, H.N., & Rizka, R.J.H. (2022). Analisis best practice kebijakan carbon tax dalam mengatasi eksternalitas negatif emisi karbon di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *7*(1), DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1182

Dreier, O. (2020). Critical psychology: Subjects in situated social practices. In M. Fleer, F. González Rey, & P. E. Jones (Eds.). *Cultural-historical and Critical Psychology: Common Ground, Divergences.*

Dua, M. (2013). Globalisasi ekonomi, budaya, kapitalis dan demokrasi. *Jurnal Ledalero*, *12* (2).

Edom, B., Agustinus, K., & Pitter, P. (2019). Potret kehidupan Suku Togutil dan kearifan lokal khususnya obat-obatan tradisional dari hutan. *Makila* (13), 67-84.

Ellis, Erle C., K. K. Goldewijk, S. Siebert, D. Lightman, and N. Ramankutty. 2010. Anthropogenic transformation of the biomes, 1700 to 2000. *Global Ecology and Biogeography*, *19*(5), 589–606.

Foster, J. B. (2012). *Marx's ecology: Materialism and nature.* New York: Monthly Review Press.

Fromm, E. (1955). *The sane society.* New York: Holt, Rinehart and Winston.

Gramsci, A. (2013). *Prison notebooks: Catatan-Catatan dari penjara.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gilbert, J. (2008). Against the commodification of everything. *Cultural Studies, 22*(5), 551–566.

Hutajulu, R.A., Sarita, N., Sinaga, E.M., & Sinaga, R. (2024). Ekspoloitasi sumber daya alam Sumatera Utara pada masa kolonial: Implikasi dan warisannya. *AR-RUMMAN-Journal of Education and Learning Evaluation, 1*(2).

Janicka, M., Pieloch-Babiarz, A., & Sajnóg, A. (2020). Does short-termism influencethe market value of companies? evidence from eu countries. *Journal of Risk and Financial Management, 13*(11), 272.

Kalpikawati, I.A., & Pinaria, N.W.C. (2023). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sampah berbasis sumber mendukung desa wisata berkelanjutan (studi kasus desa wisata Taro, Bali). *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, *28*(1), 50-68. doi: https://doi.org/10.30647/jip.v28i1.1676

Kushendrawati, S.M. (2006). Masyarakat konsumen sebagai ciptaan kapitalisme global: Fenomena budaya dalam realitas sosial. *Makara, Sosial Humaniora,10*(2), 49-57.

Lumbantoruan, J. & R.C., Marbun. (2025). Tanggung jawab etis dalam pengambilan keputusan di era kapitalisme global.. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, *4*(1) Januari 2025

Mailisa, E. R., Yulianto, B., & Warsito, B. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai di Kabupaten Pati : Studi kasus Sungai Sani. *Prosiding Seminar Nasional, Semarang 2 Desember 2020 "Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, Kesiapan Perangkat dan Pola Standarisasi".*

Mulati, I..R., & Kuswati, R. (2022). Pengaruh sikap lingkungan dalam memprediksi perilaku prolingkungan yang di mediasi oleh kepedulian lingkungan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, *18* (3), 222-233.

Mustofa, M.U., Raudya, M. D. K., Nurdini, F.M. & Sulaeman, K. M. (2022). Radikalisasi *grassroots movements* dalam politik ekologi di Indonesia pasca reformasi. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, *4*(1).

©2025 Sari

Nisbet, E.K.L., Zelenski, J.M., & Murphy, S.A. (2009). The nature relatedness scale: Linking individual connection with nature to environmental concern and behavior. *Environment and Behavior 41*, 715-740.

Ohoiwutun, B. (2020). *Posisi dan peran manusia dalam alam: Menurut deep ecology Arne Naess.* PT Kanisius: Yogyakarta.

Prilleltensky, I. (2008). Critical psychology: An introduction. *Journal of Community &Applied Social Psychology, 18*(1), 29-39

Rathzel, N., & Uzzell, D. (2019). Critical psychology –'kritische psychologie': Challenging environmental behavior change strategies. *Annual Review of Criticalpsychology*, *16*, 1375-1413.

Shiva, V. (2008). *Soil not oil: Environmental justice in an age of climate crisis.* South End Press.

Solomonian, L., & Di Ruggiero, E. (2021). The critical intersection of environmental andsocial justice: a commentary. *Global Health 17*, 30.

Spivak, G.C. (1988). *Can the subaltern speak? In Marxism and the interpretation of culture, edited by C. Nelson and L. Grossberg*. Urbana/Chicago: University of Illinois Press.

Steffen, W., P. J. Crutzen, & J. R. McNeill. 2007. The anthropocene: Are humans now overwhelming the great forces of nature? *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, *36*(8), 614–21.

Steffen, W., Persson, Å., Deutsch, L., Zalasiewicz, J., Williams, M., Richardson, K., Crumley, C., et al. (2011). The anthropocene: From global change to planetary stewardship. *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, *40*(7), 739–61

Stern, P. C. (2000). Psychology and the science of human-environment interactions. *American Psychologist, 55*(5), 523–530.

Tampubolon, Y.H. & Purba, D.F. (2021). Kapitalisme global sebagai akar kerusakan lingkungan: Kritik terhadap etika lingkungan. *Jurnal Agama dan Masyarakat,9*(1), 83-94.

Yuono, R.Y. (2019). Melawan etika lingkungan antroposentris melalui interpretasi teologi penciptaan sebagai landasan bagi pengelolaan-pelestarian lingkungan. *Jurnal Fidei, 2*(1).

©2025 Sari